



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SOFYAN**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**
3. NHK : **116101**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.565.000.000**

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah Seluas 229 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , WARISAN Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **1.213.000.000**

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. MOBIL, TOYOTA ALPHARD BUS Tahun 2012, LAINNYA Rp. 400.000.000
6. MOBIL, MAZDA CX-3 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERTHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **274.544.059**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. **4.052.544.059**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.052.544.059

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.